

## Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SD

Ridla 'Adawiyah<sup>1</sup>, DinieAnggraeni Dewi<sup>2</sup>, Yayang Furi Furnamasari<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pendidikan Indonesia  
Email : [ridlaadw@upi.edu](mailto:ridlaadw@upi.edu)<sup>1</sup>, [Dinianggraenidew@upi.edu](mailto:Dinianggraenidew@upi.edu)<sup>2</sup>, [furi2810@upi.edu](mailto:furi2810@upi.edu)<sup>3</sup>

### Abstrak

Pancasila adalah dasar filsafat negara. Ia diyakini berisi kebajikan dan dapat menjadi panduan dalam mengembangkan identitas Indonesia . Oleh karena itu, Pancasila dijadikan materi pembelajaran dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia Merujuk pada teori kewarganegaraan komunitarian dan struktural fungsional, nilai Pancasila berisi tentang ide kehidupan yang baik, sebagai nilai konsensus dan dengan demikian menjadi sumber bagi terciptanya integrasi sosial. Pendidikan Kewarganegaraan adalah salah satu mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan karakter warganegarannya yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga Negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi literatur dari berbagai sumber seperti buku, jurnal dan yang lainnya. Hasil dari penelitian ini adalah Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peranan serta fungsi yang sama sama sangat penting dalam penerapan nilai-nilai Pancasila yang ada. Nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan kewarganegaraan adalah bagian dari implementasi Pancasila dalam kehidupan bernegara, dapat dilakukan dengan menjadikan Pancasila sebagai materi pelajaran yakni materi rumus atau eksistensi dan materi isi atau substansi Pancasila dalam konsep pandangan hidup bangsa,

**Kata Kunci :** *Nilai-nilai Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Sekolah Dasar*

### Abstract

Pancasila is the basis of state philosophy. It is believed to contain virtue and can be a guide in developing Indonesian identity. Therefore, Pancasila is used as learning material in civic education in Indonesia. Referring to the theory of communitarian citizenship and functional structural, the value of Pancasila contains the idea of a good life, as a consensus value and thus becomes a source for the creation of social integration. Citizenship Education is one of the subjects that focuses on building the character of citizens who understand and are able to carry out their rights and obligations to become intelligent, skilled and characterized Indonesian citizens mandated by Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Methods which is used in this study is a research method with a descriptive qualitative approach. Data collection techniques are carried out by studying literature from various sources such as books, journals and others. The result of this research is that Pancasila and Citizenship Education have the same role and function which is very important in implementing the existing Pancasila values. Pancasila values through civic education are part of the implementation of Pancasila in the life of the state, this can be done by making Pancasila the subject matter, namely the formula or existence material and the content or substance of Pancasila in the concept of the nation's view of life,

**Keywords:** *Pancasila values, Citizenship Education, Elementary School*

## PENDAHULUAN

Sesuai UU no. 20 Tahun 2003 Pendidikan adalah suatu usaha yang disadari dan disusun untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran dengan tujuan agar siswa secara efektif mengembangkan kemampuannya untuk memiliki kekuatan, ketenangan, watak, pengetahuan, orang yang terhormat, dan kemampuan yang dibutuhkan secara mendalam. Pengertian persekolahan secara keseluruhan adalah suatu usaha yang disadari dan disusun untuk menciptakan suasana belajar dan proses belajar bagi siswa untuk secara efektif menumbuhkan kemampuan mereka untuk memiliki karakter, pengetahuan, orang yang terhormat, dan kemampuan yang diperlukan tanpa orang lain dan masyarakat. Pengajaran di Indonesia sangat beragam mulai dari orang-orang yang mengenal agama, sosiologi, ilmu-ilmu alam dan lainnya, namun ada satu sekolah yang penting dan harus dirasakan oleh semua siswa di Indonesia, yaitu pelatihan kewarganegaraan khusus.

Bagi masyarakat Indonesia, Pancasila telah diakui sebagai dasar negara. Pancasila mengandung lima standar, standar atau kualitas, khususnya kesucian, kemanusiaan, solidaritas, sistem berdasarkan suara, dan kesetaraan. Pengaturan mengenai kelima sifat tersebut terdapat dalam konstitusi Indonesia, khususnya Pembukaan UUD 1945 pasal IV. Pancasila, mengenai hipotesis kewarganegaraan komunitarian (Will Kymlicka, 2001) dan fungsionalisme primer (George Ritzer, 2004), dapat dikatakan mengandung kemungkinan kehidupan yang besar, adalah konsekuensi dari penataan wilayah lokal, kualitas sosial bersama. yang menentukan kehidupan, dan dapat menjadi sumber bagi pergaulan sosial.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran yang menyoroti perkembangan peserta didik yang berbeda-beda baik dari segi agama, sosial budaya, bahasa, usia, dan jati diri menjadi warga negara yang cerdas, bertalenta, dan berkarakter sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Pelatihan nilai kurikulum dikoordinasikan dalam mata pelajaran sekolah perkotaan. Kualitas-kualitas yang terkandung dalam metro schooling adalah kualitas legalisme, amanah, pengetahuan, kekuatan, mindful, mayoritas aturan, patriot, konsistensi dengan pedoman sosial, tentang keragaman, memantau kebebasan dan komitmen diri sendiri dan orang lain. Sifat-sifat ini harus digerakkan oleh siswa untuk menjadi penduduk yang dapat diterima dan cerdas.

Pengalaman menunjukkan bahwa pelaksanaan Pancasila melalui persekolahan diselesaikan dengan memasukkannya sebagai komponen materi informatif Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia. Upaya menjadikan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai metode sosialisasi Pancasila pernah dilakukan pada masa Orde Lama, khususnya dengan ilustrasi PKn (1960), Orde Baru, dengan menerapkan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di 1975, 1984 program pendidikan dan contoh Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. (PPKn) mengingat program pendidikan 1994. Permintaan perubahan dengan ilustrasi tentang Kewarganegaraan (2004), Pendidikan Kewarganegaraan (2006) dan PPKn (2013).

Berdasarkan pengalaman di atas, Pancasila secara konsisten menjadi bahan ajar pendidikan kewarganegaraan Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa Pancasila adalah substansi materi PKn. Pancasila sebagai sebuah gagasan itu sendiri memiliki implikasi dan klarifikasi yang berbeda-beda sesuai dengan cara menyikapi perasaan yang sudah selesai. Oleh karena itu, patut dipertanyakan apa substansi Pancasila dan nilai-nilai Pancasila yang mana yang seharusnya dijadikan sebagai substansi materi dalam Pendidikan Kewarganegaraan yang sampai saat ini belum dirinci secara jelas dan efektif.

Sifat-sifat dasar Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Penghormatan Persatuan Indonesia, Penghormatan Kerakyatan yang dipimpin oleh kelikhaian dalam Permusyawaratan dan Perwakilan, dan Penghormatan Keadilan Sosial bagi setiap individu Indonesia (Dewantara et al., 2021). Sangat mungkin cara yang paling tepat untuk memberikan pembentukan etika kepada anak negara adalah pelatihan karakter yang bergantung pada kualitas Pancasila. Pengajaran karakter Pancasila untuk pengganti negara Indonesia berarti membentuk negara yang kokoh, serius dengan pribadi yang terhormat, kualitas yang mendalam, ketahanan, ilmu pengetahuan dan inovasi terletak, yang semuanya dimotivasi bersandar pada keyakinan yang tak tergoyahkan dan

pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa yang bergantung pada kualitas. terkandung dalam Pancasila. Dibedakan oleh (Somantri, 1967)

Pendidikan kewarganegaraan adalah program edukatif yang bertumpu pada nilai-nilai Pancasila sebagai wahana untuk menciptakan dan melindungi kehormatan dan kebajikan yang berakar pada cara hidup negara yang diandalkan untuk berubah menjadi kepribadian yang ditunjukkan sebagai perilaku dalam rutinitas rutin masyarakat. siswa baik sebagai manusia, sebagai pengajar/guru yang akan datang, individu daerah setempat dan manifestasi Tuhan Yang Maha Esa. Dengan berkonsentrasi pada PKn, diyakini mahasiswa dapat menjadi anggota masyarakat yang produktif dan berkarakter.

Pendidikan kewarganegaraan membantu siswa dengan membentuk pandangan dan perspektif sebagai warga yang mencerminkan atau sesuai dengan kualitas manusia. Ini termasuk penataan karakter atau karakter, karena sekolah kota memasukkan nilai-nilai kehidupan normal dari wilayah sekitarnya. Motivasi mendasar di balik pelatihan metro adalah untuk menumbuhkan pengetahuan dan perhatian kepada negara, seperti halnya untuk membina mentalitas dan perilaku yang rapuh untuk menghargai negara yang bergantung pada cara hidup negara.

Tinjauan ini sangat penting untuk dilakukan untuk beberapa waktu. Pertama, bahwa Pancasila sebagai kerangka nilai yang telah didelegasikan sebagai premis negara memerlukan pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, pelaksanaan Pancasila harus dimungkinkan dengan berbagai cara, salah satunya melalui pengajaran. Ketiga, bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sangat diidentikkan dengan Pancasila. Pancasila, baik sebagai sistem kepercayaan maupun sebagai dasar negara, penting bagi metafisika PKn. Keempat, substansi atau kandungan Pancasila yang diramu dapat dimanfaatkan untuk membentuk watak atau kepribadian masyarakat, mengingat Pancasila dipandang sebagai dasar pembentukan kepribadian negara Indonesia dan merupakan salah satu komponen kepribadian yang sebenarnya. . Kelima, Substansi Pancasila dalam Metro Schooling di Indonesia sebenarnya menghadapi sejauh penemuan yang secara umum akan menanamkan dan selanjutnya substansi Pancasila itu sendiri yang pada umumnya akan bersifat menindas sebagai cara untuk melegitimasi kekuatan yang ada. 6, Pancasila yang memiliki situasi yang berbeda dengan, dan terjemahan membutuhkan pengorganisasian dan asosiasi yang jelas sebagai materi PKn. Ketujuh, sepengetahuan pencipta, hingga saat ini belum ada kajian ilmiah yang secara eksplisit mengkaji dan merencanakan materi Pancasila dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di sekolah mengingat pengalaman bahwa Pancasila secara konsisten menjadi substansi PKn.

### **Konsep Pendidikan Kewarganegaraan**

PKn sering juga disebut Pendidikan Kewarganegaraan, yang mengkaji tentang kewarganegaraan, etika, norma, hukum, karakter dan lain-lain. Pengajaran Metro adalah program edukatif yang bertumpu pada nilai-nilai Pancasila sebagai wahana untuk menciptakan dan melindungi kehormatan dan kebajikan yang berakar pada kehidupan negara yang diandalkan untuk menjadi karakter yang ditunjukkan sebagai perilaku sehari-hari. rutinitas mahasiswa baik sebagai manusia, sebagai instruktur/guru yang direncanakan, individu daerah dan manifestasi Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan berkonsentrasi pada PKn, diyakini mahasiswa dapat menjadi anggota masyarakat yang produktif dan berkarakter. Pelatihan kota membantu siswa dengan membina mentalitas dan perspektif sebagai penduduk yang mencerminkan atau bersahabat dengan kualitas manusia. Dikenal untuk pengembangan karakter atau karakter, karena pengajaran kota memasukkan nilai-nilai kehidupan yang umum dari daerah sekitarnya. Alasan utama sekolah kota adalah untuk mendorong pengetahuan dan perhatian kepada negara, serta untuk membentuk perspektif dan perilaku yang sensitif untuk menghargai negara tergantung pada budaya publik yang harus dimiliki oleh penduduk yang meliputi; kemampuan ilmiah dan kemampuan investasi. Untuk sementara, tata krama perkotaan diidentikkan dengan pribadi dan publik warga yang harus dipertahankan dan ditingkatkan dalam pemerintahan kerakyatan yang keramat.

Sapriya (2007) berdasarkan penilaian Hanna dan Lee (1962) merekomendasikan bahwa materi IPS dapat menggabungkan 3 (tiga) sumber, lebih spesifiknya pertama, materi kasual yang dapat ditemukan dalam latihan daerah, latihan individu DPR, latihan resmi, dan lain-lain. lainnya. Kedua, disiplin substansi konvensional yang menggabungkan topografi, sejarah, teori politik, masalah keuangan, humanisme, penalaran, humaniora, dan hukum. Ketiga, reaksi mahasiswa, khususnya reaksi mahasiswa, baik substansi kasual maupun substansi formal. Materi ini dapat dibuat pada substansi atau isi PKn dengan catatan harus disesuaikan dengan visi, misi, dan atribut PKn.

Dalam hal substansinya adalah disiplin formal, materi PKn dapat diambil dari teori politik seperti kewarganegaraan atau ilmu kewarganegaraan. Logikanya, berangkat dari kajian kewargaan yang merupakan bagian dari teori politik, materi yang ditampilkan PKn berpusat pada mayoritas politik pemerintahan pemerintahan yang kemudian, pada saat itu, sebenarnya harus diubah sesuai dengan tingkat kebutuhan belajar atau disebut esensial human latihan (Numan Somantri, 2001). Pancasila memasukkan substansi (isi) PKn yang bersifat formal. Menurut Sapriya (2007), substansi desain konvensional harus serupa dan non-debatable (non-debatable, given) karena merupakan komponen perekat dan pemersatu negara yang akan membentengi jiwa identitas Indonesia. Numan Somantri (2001) menetapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai materi pendidikan kewarganegaraan Indonesia yang "Harusnya Agung", termasuk Indotrinerasi yang tak terhindarkan, yang harus disamarkan kepada warga.

#### **Hakikat Pancasila**

Pancasila sebagai dasar negara mengisyaratkan agar Pancasila dimanfaatkan sebagai dasar penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa semua eksekusi dan eksekusi harus mencerminkan kualitas Pancasila dan tidak harus perjuangan. Sesuai Damanhuri dkk (2016: 183) secara etimologis Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta yang mengandung arti pancasila mengandung arti lima dan sila mengandung arti gabungan batu, dasar dan pendirian. Pancasila memiliki lima implikasi penting, sedangkan undang-undang yang sebenarnya secara teratur diuraikan sebagai perubahan atau aturan perilaku yang sesuai. Perwujudan adalah sesuatu yang ada pada diri individu atau sesuatu yang seharusnya ada pada diri sendiri. Pancasila merupakan sesuatu yang asing bagi penduduk, yang diterapkan dalam pembukaan UUD 1945 pasal IV dan digunakan sebagai dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 undang-undang. Meskipun dalam UUD 1945 tidak secara langsung dijelaskan tentang Pancasila, namun Pancasila telah dimasukkan dalam semangat bangsa Indonesia bahwa Pancasila adalah aturan yang harus mendarah daging dalam diri. Sesuai Suraya (2015:154) Pancasila adalah dasar negara Indonesia, Pancasila disamakan dengan pendirian, maka semakin membumi pendirian, maka semakin membumi suatu bangsa. Pancasila juga mencerminkan karakter bangsa Indonesia karena di dalamnya terdapat unsur-unsur yang setiap kali dilaksanakan akan mencerminkan negara Indonesia.

Melihat pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa perwujudan Pancasila adalah sesuatu yang terkandung dalam sifat-sifat yang terkandung dalam statuta Pancasila yang harus dimanfaatkan sebagai premis negara. Pancasila menunjukkan intisari atau substansi Pancasila, tepatnya premis atau ekspresi fundamental dari Tuhan, manusia, individu, dan kesetaraan. Dapatkan awalan dan akhiran ke-an, pekerjaan, alam surga, kemanusiaan, solidaritas, sistem aturan mayoritas, dan kesetaraan. Inti atau substansi memiliki gagasan unik, umum, tersebar luas, langsung, tetap, konstan, tidak terlalu memperhatikan keadaan, tempat, dan waktu.

#### **Hakekat Nilai**

Nilai pada dasarnya adalah sifat atau kualitas yang ditambahkan ke sebuah artikel, jadi bukan hanya item yang digunakan sebagai nilai. Kualitas dimanfaatkan oleh manusia sebagai premis, inspirasi, dan arah dalam segala aktivitas selama hidupnya. Nilai adalah sesuatu yang dialami sebagai ajakan untuk panggilan hidup. Menurut Susanti (2013:71) "nilai-nilai dapat mendorong kita untuk bertindak dan mengarahkan pertimbangan, menarik kita ke jalan diri kita sendiri, dan kualitas-kualitas terpancar untuk melakukan gerakan yang

memanggil". Seperti yang ditunjukkan oleh Rukiyati (2013:51) "penghargaan adalah sesuatu yang penting, dapat diterima dan bermanfaat bagi orang atau suatu jaminan nilai yang diidentikkan dengan jenis dan minat dan menjadi alasan untuk memutuskan perilaku manusia". Berdasarkan gambaran di atas, maka dapat diduga bahwa nilai adalah sifat menghargai sesuatu, menarik, bermanfaat, bermanfaat, dan dapat dipertahankan, sehingga nilai Pancasila nantinya akan muncul kerangka nilai dalam Pancasila.

### **Sistem Nilai Dalam Pancasila**

Pancasila sebagai kerangka nilai mengandung suatu perkembangan sifat-sifat yang saling berkaitan satu sama lain. Seperti yang ditunjukkan oleh Imron (2017:16) "kerangka nilai adalah suatu gagasan atau pemikiran yang menyeluruh mengenai apa yang dipandang sebagai besar, penting, dan signifikan dalam kehidupan yang ada dalam otak individu atau bagian dari masyarakat". Pancasila sebagai kerangka nilai dikenang karena keutamaan atau nilai kebaikan dan merupakan sifat hakiki yang bersifat teoritis. "Pancasila sebagai kerangka nilai mengandung sifat-sifat yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Sedangkan sifat-sifat yang terkandung dalam Pancasila adalah sifat-sifat ketuhanan, kemanusiaan, solidaritas, sistem aturan mayoritas, dan kesetaraan. (Rukiyati dkk, 2013:56). Pancasila sebagai kerangka nilai juga mempersepsikan berbagai sifat secara utuh dan damai, khususnya sifat-sifat kebenaran, perasaan, moral, dan agama. Sifat penghayatan Pancasila adalah berimbang dan abstrak.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif, yaitu salah satu investigasi sosial yang tujuannya untuk memberikan sedikit pengertian atau penjelasan tentang ide-ide atau contoh-contoh yang digunakan dalam pemeriksaan tersebut. (Neuman: 2003). Motivasi di balik eksplorasi ini adalah untuk meningkatkan poin baru yang dikenal di wilayah lokal yang lebih luas, memberikan garis besar tema yang mendasar, merangkum pemikiran dan mengembangkan hipotesis spekulatif.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. (Moleong 2007: 4) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata kata dan bahasa pada konteks khusus yang dialami dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dalam penulisan artikel ilmiah ini digunakan dengan pedoman karya tulis ilmiah dari Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2019 dan menggunakan metode pengumpulan data dengan membaca dan menelaah (studi literatur) yang berhubungan dengan permasalahan yang dikemukakan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pancasila sebagai realitas yang mengandung makna bahwa Pancasila ada dalam diri individu dan masyarakat Indonesia sebagai kebenaran yang tidak dapat dihindarkan dari suatu negara yang berkembang dan berkreasi dalam kehidupan sehari-hari (Syarbaini, 2006:20). Kaelan (2010:119) menyatakan "Pancasila sebagai falsafah tidak kaku dan tertutup, tetapi reformatif, dinamis dan terbuka. Hal ini menyiratkan bahwa falsafah Pancasila itu sejati dan konsisten serta dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan inovasi sebagaimana adanya. sekarang ini banyak masyarakat dan sifat-sifat dari alam semesta yang berbeda mulai masuk ke Indonesia dan perbaikan masyarakat atau dapat juga dikatakan bahwa falsafah pancasila adalah sistem kepercayaan terbuka, bukan tertutup. .

Hal-hal seperti inilah yang membuat Pancasila diangkat dari perspektif eksistensi masyarakat Indonesia. Di Indonesia disadari perbedaan istilah yang terjadi dalam rencana pendidikan sekolah, lebih tepatnya pada tahun 1957 dikenal dengan kewarganegaraan, tahun ini hanya membahas cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan (Nurgiansah, 2021b). Pada saat globalisasi berubah dengan cepat, mempengaruhi pergerakan kualitas Pancasila. Indonesia yang dulu dikenal sebagai negara yang ramah,



amenable dan peka, kini telah berubah menjadi negara yang penuh dengan inkonsistensi dan pemberontakan logis.

Oleh karena itu, hendaknya ada siswa-siswa yang menjunjung tinggi Pancasila di sekolah-sekolah agar para siswa berkembang dan berkreasi sesuai dengan sifat-sifat yang terkandung dalam Pancasila. Secara hipotetis, substansi yang terkandung dalam pelatihan perkotaan mempersepsikan tiga bidang secara khusus, informasi metro, kemampuan kota dan sikap masyarakat (MS Branson 1998) atau kejujuran kota, kerjasama kota dan informasi kota (Quigley, Buchanan, dan Bahmueller, 1998). Di sekolah, anak-anak diperlihatkan berbagai macam mata pelajaran yang membantu wawasan, mata pelajaran ini diajarkan oleh setiap pendidik kepada setiap siswa.

Mata pelajaran yang sangat vital untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan budi pekerti yang baik serta memiliki rasa solidaritas dan kejujuran masyarakat adalah Pendidikan Kewarganegaraan. Pada dasarnya pelatihan kewarganegaraan dididik di sekolah-sekolah, dengan tujuan agar siswa dididik tentang rasa cinta tanah air pasti bisa disebut energi positif. Perasaan energi positif menunjukkan kepada siswa bagaimana menjadi penduduk yang memiliki sektarianisme dan keteguhan terhadap negaranya dan untuk memahami kepribadian negara. Dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, tidak hanya ada perasaan energi positif saja tetapi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan juga mengajarkan tentang rasa cinta tanah air yang tentunya dapat dikenal sebagai rasa Nasionalisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

#### **Implementasi Nilai-Nilai Pancasila**

Saksi ahli umumnya berpendapat bahwa pendidikan kota identik dengan Pancasila, khususnya sekolah kota di Indonesia mengajarkan Pancasila kepada siswa. Bagaimanapun, hubungan antara sekolah, pelatihan kewarganegaraan dan Pancasila adalah sesuatu yang lebih dari itu. Bahwa Pancasila adalah premis, pedoman sekolah umum dan bahwa Pancasila ada dalam PKn. Kewarganegaraan pada umumnya mencatat warga agar mereka memahami dan menjadi anggota masyarakat yang produktif. Dengan mewariskan pancasila melalui community schooling, mendidik warga agar tahu kearifan lingkungan, mencatat wawasan, kerangka negara, tahu apa yang ada di bangsa, tahu kebebasan dan komitmennya agar nanti kita tidak kehilangan kepribadian publik kita, tidak melenyapkan mayoritas sistem aturan.

Padahal Pancasila adalah pusat sekolah kota di Indonesia. Ini adalah karakter sekolah kota, bukan hanya pelatihan yang adil. Apalagi para ahli tidak membahas bagaimana cara menjalankannya, namun substansi Pancasila seperti pedoman wawasan masyarakat sekitar, peraturan perundang-undangan, etika bernegara Indonesia harus diberikan. Dengan Pancasila ini, PKn berbicara menurut perspektif filosofis. Sehingga substansi Pancasila dikenang PKn untuk menginstruksikan warga yang perlu mengetahui pola pikir negaranya. Cara berpikir Indonesia harus menjadi substansi PKn di Indonesia. Ada kesamaan pandangan bahwa PKn diidentikkan dengan Pancasila. Kaitannya adalah bahwa Pancasila merupakan substansi atau isi PKn. Dengan substansi Pancasila, akan menyebabkan PKn di Indonesia menjadi pedoman hidup yang menjunjung tinggi anggota masyarakat yang produktif untuk tatanan Indonesia. Pancasila merupakan pusat PKn di Indonesia.

Mengenai bagian atau sisi Pancasila yang dapat dikenang untuk PKn, beberapa penemuan eksplorasi dapat diambil dari pandangan ahli. Substansi Pancasila dalam PKn dapat dilihat dari dua hal, yaitu substansi Pancasila sebagai tinjauan atau butir itu sendiri (Pancasila as genetivus objectivus) dan kajian menurut sudut pandang Pancasila atau Pancasila as genetivus subjectivus. Kedua, sebagai objek kajian, substansi Pancasila yang terkandung dalam PKn dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, misalnya dari sisi yang dapat dibuktikan (sejarah perjuangan negara, cara pembentukan Pancasila yang paling umum), sisi yang sah (Pancasila sebagai sumber hukum administratif dan konstitutif sebagaimana tertuang dalam UUD 1945), sosiologis budaya (perbuatan menjunjung tinggi Pancasila), masalah pemerintahan (moral politik), dan kajian filosofis (makna Pancasila, sistem kepercayaan terbuka). Ketiga, substansi Pancasila juga dapat ditelaah dan dari tiga

tempat Pancasila, secara spesifik Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai sistem kepercayaan masyarakat dan Pancasila sebagai pandangan.

Substansi Pancasila sebagai pandangan hidup negara menjadi penting karena memiliki kapasitas yang berbeda-beda dan dapat menjadi sumber pembentukan kepribadian masyarakat. Keempat, Pancasila sebagai objek kajian ini, sudut pandang yang dipilih dan dapat diajarkan disesuaikan dengan derajat pendidikan, derajat kebutuhan dan kemajuan siswa. Kelima, Pancasila sebagai salah satu objek kajian PKn pada hakikatnya bersifat lestari, merupakan suatu nilai luhur yang diperoleh dari arketipe negara, namun dalam cara penyajiannya cenderung diciptakan untuk kepentingan kebutuhan siswa sehingga sangat mungkin menarik (reformisme). Keenam, Pancasila dalam PKn saat ini lebih banyak menjadi objek kajian, bahkan lebih bersifat *genetivus objectivus*, belum sarat dengan gagasan *genetivus subjectivus*. Ketujuh, penting untuk menumbuhkan substansi Pancasila sebagai *genetivus subjectivus* agar setiap pembelajaran PKn dapat dilihat dari Pancasila, sifat-sifat Pancasila, setiap percakapan PKn, dan pusat Pancasila PKn yang dapat menularkan energi kepada setiap salah satu substansi yang terkandung dalam PKn. Indonesia.

### **Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan**

Pemanfaatan nilai-nilai pancasila dalam pembelajaran perkotaan adalah untuk menumbuhkan bahan informasi hipotetis (*content information*) Pancasila sebagai bahan ajar di ruang belajar atau sebagai informasi substansi akademik. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa materi Pancasila yang telah dibuat melalui rencana pembelajaran adalah prospektus, rencana ilustrasi (RPP) dan modul PKn serta pelaksanaan pembelajaran materi Pancasila di ruang belajar. Hasil pemeriksaan juga menunjukkan bahwa selama menyampaikan materi tentang "resep" Pancasila, pendidik PK lebih banyak menggunakan pembelajaran deskriptif atau pengajar yang menjelaskan secara efektif. Sedangkan untuk materi "isi".

Pancasila, pengajar PKn memanfaatkan dinamika belajar siswa tambahan. Meskipun materi Pancasila diajarkan dan sebagai konten yang bersifat formal, bagaimanapun juga dapat dikordinasikan untuk memenuhi materi yang bersifat reaksi siswa atau dapat mengatasi masalah dan minat siswa. Materi ajar yang dapat menjawab permasalahan dan minat mahasiswa merupakan salah satu materi model yang bagus. Peluang tersebut terutama untuk materi "isi" Pancasila. Mempelajari materi "kandungan" Pancasila meminta para siswa untuk tanpa pamrih menumbuhkan pertimbangan mereka dalam memberikan sambutan, memberikan contoh cara pandang dan perilaku, baik yang patut maupun yang tidak sesuai dengan sifat-sifat Pancasila. Model yang diberikan biasanya model kecil dan asli yang dilihat oleh siswa yang sebenarnya seperti yang ditunjukkan oleh pergantian acara mereka. Latihan-latihan pembelajaran yang terpaku pada pendidik serta dapat membuat pembelajaran siswa menjadi dinamis.

Mengingat hal ini, materi Pancasila meskipun mengandung cara berpikir perenialisme persekolahan, dalam pembelajaran di kelas dapat menganut cara berpikir pengajaran reformisme, khususnya sejauh memperluas model dan gambaran yang diberikan oleh kepentingan. dan kebutuhan mahasiswa serta menciptakan sistem pembelajaran yang bergantung pada mahasiswa. Dari segi isi pembelajaran, pendidikan nilai pancasila menyinggung sifat-sifat luhur bangsa (perenialisme), namun dalam pelaksanaan pembelajarannya cenderung dibuat dengan menitikberatkan pada kepentingan siswa dan pembelajaran siswa yang dinamis (reformisme). Oleh karena itu, kecenderungan penanaman dalam strategi pembelajaran dapat diabaikan meskipun sejauh isi merupakan pengaruh yang tidak dapat dihindarkan. Mengenai materi, siswa masih diberi kesempatan untuk bereaksi dan merenungkan sifat-sifat ini sampai akhirnya diakui dan dianggap sebagai nilai kehati-hatian.

### **SIMPULAN**

Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peranan serta fungsi yang sama sama sangat penting dalam implementasi nilai nilai pancasila yang ada. Dalam implementasi Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan adalah bagian dari implementasi

Pancasila dalam hidup berbangsa dan bernegara, dapat menjadikan Nilai-Nilai Pancasila sebagai dasar untuk pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang ada, sebagai materi pembelajaran materi rumus serta materi isi atau substansi Pancasila dalam konsep pandangan hidup bangsa, ideology, kebangsaan dan dasar Negara sebagai satu keatuan yang utuh yang saling berhubungan, yang disertai dengan perimbangan pemikiran pemikiran terhadap Pancasila.

Dari pembahasan diatas mengenai “Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di SD” dapat peneliti simpulkan bahwasanya penerapan nilai-nilai pancasila kedalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu bagian dari implementasi Pancasila dalam kehidupan bernegara, dapat dilakukan dengan menjadikan Pancasila sebagai materi pelajaran yakni materi rumus atau eksistensi dan materi isi atau substansi Pancasila dalam konsep pandangan hidup bangsa, ideologi kebangsaan, dan dasar negara sebagai satu kesatuan yang saling berhubungan, disertai jenis pendekatan pendekatan ilmiah dan tafsir untuk mengembangkannya yakni sosiologis, filosofis, historis dan yuridis, dan dengan mempertimbangkan pemikiran Pancasila dalam jalur politik kenegaraan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, K., & Hidayat, A. (2020). Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan PKn melalui Pembelajaran Learning Community pada Siswa Sekolah Dasar. CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 8(2), 75-83.
- Akbal, M. (2017, October). Pendidikan Kewarganegaraan dalam pembangunan karakter bangsa. In Prosiding Seminar Nasional Himpunan Sarjana Ilmu-Ilmu Sosial (Vol. 2, pp. 485-493).
- Dewantara, J. A., Hermawan, Y., Yunus, D., Prasetyo, W. H., Efriani, Arifiyanti, F., & Nurgiansah, T. H. (2021). Anti-Corruption Education as an Effort to Form Students With Character Humanist and Law-Compliant. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 18(1), 70-81.
- Hadiwijono, A. (2016). Pendidikan Pancasila, eksistensinya bagi mahasiswa. Jurnal Cakrawala Hukum, 7(1), 82-97.
- Handitya, B. (2019). Menyemai Nilai Pancasila Pada Generasi Muda Cendekia. ADIL Indonesia Journal, 1(2).
- Ali M. Harisa dan Mustari. 2010. Pendidikan Kewargaan. Makassar: Universitas Negeri Makasaar.
- Sati, A. L., Marhamah, M., Nurhot, N., & Dewi, U. (2021). Representasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbudaya. Jurnal Syntax Fusion, 1(2), 1-11.
- Sulianti, A. (2018). Revitalisasi pendidikan pancasila dalam pembentukan life skill. Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, 6(2), 111-117.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Kemendiknas. 2010. Pengembangan Pendidikan Budaya Sebagai Karakter Bangsa. Jakarta: Kemendiknas.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 81A tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013.
- Strauss, Anselm & Corbin, Juliet . (2003). Dasar- Dasar Penelitian Kualitatif. Terj. M Shodiq & Mustaqien. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahab, Abdul Azis & Sapriya. (2007). Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan . Sekolah Pasca Sarjana UPI. Bandung : UPI Press
- Winarno. (2011). Implementasi Pancasila melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Disertasi Sekolah Pascasarjana UPI Bandung . Tidak diterbitkan